

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan terciptanya suatu kesejahteraan masyarakat, serta menghibahkan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi daerahnya. Dengan hal ini pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan gagasan dan ide cemerlang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi yang digagas oleh pemerintah Indonesia kini lebih mehidupkan pada sentra usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengedepankan sumber daya manusia mengingat keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah yang sekarang banyak bermunculan di Negara Sedang Berkembang (NSB).

Saat ini memasuki era dimana pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga dari 10 negara berkembang yang akan mendominasi pasar global pada 2028, prediksi tersebut berdasarkan analisis (Movanita, 2019). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa 90% - 95% perusahaan di Indonesia dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui UMKM berbagai potensi daerah, seperti kekayaan alam, kekhasan budaya, dan keterampilan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih maju.

Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian didominasi oleh kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang semakin meningkat. Perhatian pemerintah tertuju pada UMKM di Indonesia dengan adanya Kementerian yang khusus membidangi UMKM yang di kenal dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM mengelompokan UMKM menjadi usaha yaitu: usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. (Faqihudin, 2011). Pengembangan usaha mikro dan kecil memerlukan strategi dan kebijakan yang implementatif. Implementatif merupakan tindakan dari sebuah perencanaan yang sudah di susun secara matang dan rinci. Sehingga usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan memiliki daya saing. Akutansi menjadi salah satu strategi kebijakan dalam mengembangkan usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar, akuntansi dalam usaha berguna dalam dasar penyusunan laporan keuangan (Arintawati, 2002).

Tingkat pertumbuhan UMKM semakin menunjukkan kenaikan yang lebih dinamis dengan menghasilkan produk berkualitas di ekonomi kreatif (Statistik, 2019). Hasil produk yang dihasilkan lebih menyesuaikan keinginan pelanggan, dibandingkan dengan industri yang telah berkembang besar. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengekspor 16% dari total ekspor non-minyak, dan membarikan sekitar 57,9% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan harga saat ini (Kemenkop UMKM, 2012).

Data diatas menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh dalam perekonomian nasional. Menurut UU No 20 tahun 2008 tentang Mikro dan UKM, batas maksimum aset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan sekitar Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan pendapatan hingga Rp50 miliar per tahun. *business sustainability* (keberlanjutan usaha) dipertahankan guna untuk meningkatkan kelanjutan suatu usaha. Wirausaha atau wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha mandiri dengan menciptakan produk baru, melakukan inovasi produk, menyusun manajemen operasi usaha, mempromosikan produk, serta mengelola keuangan usaha (Zakky, 2018).

Salah satu daerah yang memiliki banyak UMKM di Jawa Timur adalah wilayah Kabupaten Jombang. Luas wilayah 1.159,50 km² dan jumlah penduduk Kabupaten Jombang tercatat 1.268.504 jiwa (Statistik, Badan Pusat Statistik, 2020). Posisi Kabupaten Jombang sangat strategis karena merupakan persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa (Surabaya - Madiun - Solo - Yogyakarta), jalur Surabaya - Tulungagung dan Jalur Malang - Tuban. Sedangkan menurut hasil wawancara kepada Bapak Bobi pada survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada tahun 2017 terdapat 5.195 UMKM yang ada di daerah Jombang.

Dan memiliki berbagai macam bidang seperti makanan, minuman, fasion, kerajinan, jasa, bangunan dan lain-lain (Badan Pusat Statistik, 2018). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan UMKM dengan jenis Usaha Mikro dalam bidang kerajinan. Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pada survei yang dilakukan pada tahun 2017 terdapat 349 usaha mikro yang tersebar di setiap kecamatan di daerah Jombang. Bidang kerajinan di daerah Jombang cukup berkembang karena ada beberapa daerah yang menjadikan kerajinan sebagai sumber dari perekonomiannya. Kerajinan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai jenis usaha seperti yang sudah merambah pasar luar negeri yaitu kerajinan manik – manik kaca di desa Plumbon-Gambang, Kecamatan Gudo dan kerajinan cor kuningan di desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung. Selain itu masih banyak kerajinan seperti mebel, anyaman tas, sangkar burung, anyaman rotan dan lain - lain.

Banyaknya UMKM khususnya usaha mikro di Jombang tidak terlepas dari cara mengelola keuangan usaha, sehingga membuat pemerintah mensosialisasikan bahwa literasi keuangan di perlukan bagi setiap usaha guna meningkatkan keberlanjutan usaha (*business sustainability*)(Susanti et al., 2019). Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu minimnya kemampuan dan waktu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usahanya sendiri (Utomo, 2020). Untuk itu penelitian ini akan membahas sejauh mana tingkat literasi keuangan usaha mikro yang ada di daerah Jombang. Pelaku usaha mikro mengeluhkan bahwa ada kendala yang dihadapi yaitu tidak memiliki pengetahuan tentang keuangan (literasi keuangan) dan cara

merencanakan keuangan yang transparan dan terorganisir, yang disebabkan minat yang rendah UMKM untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi yang telah dilakukan (Widayanti et al., 2017). Literasi keuangan yang ada di daerah Jombang saat ini masih relatif kurang, minat rendahnya pelaku usaha dalam melakukan pencatatan dan pembukuan dalam usahanya. UMKM yang mempunyai dasar pengetahuan keuangan yang baik akan mampu untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih baik seperti pinjaman pada pihak ketiga atau lembaga keuangan, investasi dan sebagainya. Jika UMKM yang tidak mempunyai dasar pengetahuan keuangan akan memungkinkan timbulnya risiko dalam usahanya seperti kerugian bahkan kebangkrutan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga UMKM dalam merencanakan dan mengelola keuangan bisa lebih baik seperti layaknya usaha besar. Literasi keuangan akan membantu bagi pelaku UMKM terkait pengelolaan usaha dimulai dari anggaran, perencanaan simpan dana usaha, hingga mencapai tujuan keuangan. Kemampuan mengelola keuangan dasar UMKM sangat diperlukan untuk kinerja usaha dan keberlangsungan usaha. Tanpa adanya pemahaman literasi keuangan dan perencanaan keuangan usaha mikro akan kesulitan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan yang dijalankan di usahanya. Literasi keuangan yang baik akan mendorong pelaku usaha untuk menciptakan perencanaan keuangan dengan baik pula.

Perencanaan keuangan merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan keuangan. Dalam study yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2019) statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kursus pelatihan dan kualifikasi kemungkinan kecil tersedia untuk pemilik usaha maupun karyawan yang bekerja di UMKM. Seperti yang diungkapkan oleh *Financial Planning Standards Board Indonesia* Perencanaan keuangan adalah proses pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana yang berguna untuk mencapai tujuan hidup seseorang. Yang termasuk dalam tujuan hidup seseorang antara lain: mendapat ridho alloh SWT atas rizki yang di berikan (dalam agama), mendapat rizki yang barokah dan manfaat, menyiapkan segala kebutuhan duniawi seperti dana sekolah anak, pensiun rumah, warisan, dan ibadah (Financial Planning Standards Board, 2020).

Sedangkan untuk tingkat literasi keuangan dan perencanaan keuangan akan mengarah pada pengembangan keuangan dan pangsa pasar UMKM. Tingkat literasi keuangan UMKM di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya (Widayanti et al., 2017). Di Indonesia literasi keuangan mempunyai tingkat pemahaman, keahlian, serta keyakinan pengelolaan keuangan dengan baik (*well literate*) hanya sebesar 21.8% saja (Saputri, 2019). Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019 literasi keuangan Indonesia meningkat sampai 38 % atau naik 8,3 % dari posisi tahun 2016 yang sampai 29,7 %. Menurut hasil wawancara kepada Bapak Bobi mengatakan hasil rekapitulasi data yang dilakukan setiap dua tahun sekali yang dilakukan terakhir pada tahun 2017

mengungkapkan bahwa meningkatnya total usaha mikro di Kabupaten Jombang yaitu 5.195 dan 5.642 total tenaga kerja yang terserap dalam usaha mikro di Kabupaten Jombang. Pada setiap agenda yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro salah satunya yaitu meningkatkan pengetahuan akuntansi di dalam sebuah usaha. Agenda tersebut diikuti oleh beberapa pelaku UMKM khususnya usaha mikro guna meningkatkan pengetahuan tentang sistem akuntansi yang berlaku dalam usaha mikro.

Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di usaha maupun keluarga adalah sama seperti tahun 2016 dengan menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama. Peningkatan itu merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, OJK dan Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat di kutip dari (Prasongko, 2020). Hubungan antara tingkat literasi keuangan, perencanaan keuangan akan melalui tahap uji, analisis dan kemudian ditentukan apakah usaha mikro menggunakan pengelolaan keuangan lebih efektif atau tidak. Literasi keuangan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan usaha yang dijalankannya (Sari, 2019). Selain literasi keuangan terdapat juga permasalahan lain yang dialami pelaku Usaha Mikro yaitu modal yang terbatas, perizinan, pembayaran pajak UMKM, minimnya inovasi, gagap teknologi. Sehingga usaha mikro

sulit bersaing dengan Usaha Mikro lain yang merencanakan usahanya dengan baik (Sandi, 2019). Kesenjangan informasi tentang pengalaman dalam berwirausaha mempengaruhi tingkat literasi keuangan di Usaha Mikro yang membuat mereka lebih rentan terhadap krisis keuangan dibandingkan dengan usaha yang sudah memiliki perencanaan baik dalam berwirausaha.

Menurut penelitian dari (Susanti et al., 2019) untuk keberlanjutan usaha maka diperlukan literasi keuangan dengan cara melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Pelaku Usaha Mikro sebaiknya melakukan pengelolaan keuangan dengan cara memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Pengelolaan keuangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan yang baik. Jadi pengelolaan keuangan (*money management*) pada umumnya merupakan jenis aktivitas yang sangat penting bagi pelaku UMKM dalam mengolah keuangan di kehidupan sehari – hari yang memiliki tujuan untuk mengolah kesejahteraan keuangan (*financial welfare*). Sedangkan menurut penelitian dari (Widayanti et al., 2017) literasi keuangan memberikan akibat kontribusi terhadap *sustainability business* atau keberlangsungan usaha Usaha Mikro, dari hasil penelitian didapatkan bahwa *financial literacy* hanya 28,9% berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha UMKM khususnya di Jatisari.

Pentingnya literasi keuangan bagi pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro dapat memberikan perkembangan yang signifikan pada usaha, selain

itu pelaku Usaha Mikro dapat mengambil keputusan di bidang keuangan atas dasar hasil laporan keuangan yang sudah disusun. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pemahaman terhadap literasi keuangan sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, tidak terkecuali pelaku Usaha Mikro agar dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar.

Peran literasi keuangan mendukung adanya pengetahuan keuangan, perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang dapat digunakan oleh para pelaku usaha agar mampu meningkatkan keberlangsungan usaha yang dijalankan. Terkait pembahasan di atas, pada penelitian ini, penulis tertarik untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap *sustainability business* pada Usaha Mikro bidang kerajinan di Kabupaten Jombang. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP *SUSTAINABILITY BUSINESS* PADA UMKM DI KABUPATEN JOMBANG”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap *sustainability bussines*?
2. Apakah perencanaan keuangan berpengaruh terhadap *sustainability bussines*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh literasi keuangan dan perencanaan keuangan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap *sustainability bussines* dan,
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan keuangan berpengaruh terhadap *sustainability bussines*.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan untuk dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel - variabel yang relevan serta dapat menganalisa suatu *sustainability bussines* yang ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada Usaha Mikro sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan variabel - variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu literasi keuangan dan perencanaan keuangan.